HIJM
*HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*

p-ISSN: xxxx – xxxx
e-ISSN: xxxx – xxxx
**Volume. 1, No. 1, April 2023**

# ANALISIS KINERJA PEMERINTAH NEGERI DALAM PEMBANGUNAN DI NEGERI WAHAI

Sauban Sabban[1], Victor Sanjak Ruhunlela [2], Muhammad Alfa Sikar[3]
[1, 2]Universitas Darussalam Ambon, Jl. Pangeran Limboro, Batu Merah Ambon, Maluku, Indonesia
[2]Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Maluku, Indonesia
Email: farelasban321123@gmail.com

***Article History***

Received: 26-02-2023

Revision: 14-03-2023

Accepted: 24-04-2023

Published: 30-04-2023

***Abstract.*** This study aims to determine the performance of the state government in development in Wahai Country, North Seram District. The type of research used in this research process uses qualitative descriptive research. The population in this study is the entire government apparatus of Wahai State, North Seram District. Respondents in this study amounted to 6 people who were part of the Wahai State Government. The data collection techniques used are observation and interviews. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the development implementation process is based on the RJPMDes that has been prepared and agreed upon together, by optimizing the implementation time well. In realizing the aspirations of the community, it is first discussed in a joint meeting and agreed upon then used as a development goal through the determination in the RJPMDes. To ensure the implementation of state government policies, there must be a mechanism that is used and becomes a reference in the running of a development activity. The State Government also has the obligation to provide reports on Infrastructure Development in the country, to the Regent through the sub-district and, provide accountability reports to BPD.

**Keywords:** Performance, State Government, Development

***Abstrak.*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah negeri dalam pembangunan di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh perangkat pemerintah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang merupakan bagian dari Pemerintahan Negeri Wahai. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan pembangunan berpatokan pada RJPMDes yang telah disusun dan disepakati bersama, dengan mengoptimalkan waktu pelaksanaan dengan baik. Dalam merealisasikan aspirasi masyarakat terlebih dahulu dibahas dalam rapat bersama dan disepakati kemudian dijadikan sebagai tujuan pembangunan melalui penetapan dalam RJPMDes. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah negeri maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan. Pemerintah Negeri juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pembangunan Infrastruktur di negeri, kepada Bupati melalui camat dan, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

**Kata Kunci:** Kinerja, Pemerintahan Negeri, Pembangunan

***How to Cite***: Sabban, S., Ruhunlela, V. S., & Sikar, M. A. (2023). Analisis Kinerja Pemerintah Negeri dalam Pembangunan di Negeri Wahai. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1 (1), 58-73. http://doi.org/10.54373/hijm.v1i1.77

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia mengambil konsep dasar pembangunan sesuai dengan kondisi terkini dari negara bangsa Indonesia, yaitu adanya keragaman dari potensi, kecakapan, keinginan dari setiap daerah di Indonesia, dan telah disepakatinya desentralisasi sebagai pola penyelenggaraan pembangunan, dimana otonomi daerah diletakkan pada tingkat Kota dan Propinsi hingga pedesaan. Dengan demikian konsep dasar pembangunannya adalah bahwa tugas dari pemerintah nasional adalah menyusun visi, misi, dan strategi pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Padahal pembangunan ekonomi sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Pusat mengharapkan suatu daerah itu dapat mengatur keperluan di daerah melalui otonomi daerah, baik urusan pemerintah kabupaten/kota maupun urusan pemerintah desa agar penyelesaian segala permasalahan yang ada di daerah bisa dengan cepat diatasi oleh pemerintah daerah.

Pada prakteknya ternyata Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini tidak secara jelas membahas tentang apa saja perangkat pemerintah yang ada di desa, sehingga dirancang lagi sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara prinsip peraturan ini memuat beberapa hal antara lain yang mengatur tentang kewenangan desa, kelembagaan pemerintah desa, aparatur desa, perencanaan desa, dan keuangan desa. Kinerja *(performance)* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi.

Pemerintah yang ada di desa merupakan suatu organisasi yang ada di Pemerintah Daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terjadinya ketidakmerataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu desa.

Pembangunan di desa tidak boleh bercampur dengan unsur-unsur politik suatu kepala SKPD sehingga tidak berdampak pada desa yang sudah maju makin sejahtera dan desa yang belum maju makin melarat. Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang meliputi pendekatan *top-down* dan *battom up,* nampaknya akan menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur pada desa.

Namun pada kenyataannya banyak daerah yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, ada sebagian besar proposal proyek pembangunan yang diajukan malah melewati berbagai kendala-kendala dari permainan birokrat yang ada di daerah. Jadi untuk dapat merumuskan sebuah konsep pembangunan desa, maka harus mengubah paradigma bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan hanya di daerah perkotaan saja tetapi di desa juga.

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pembangunan infrastruktur di desa tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, desa dan kota memiliki potensi yang berbeda sehingga dengan memadukan keduanya sehingga diperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Negeri Wahai merupakan salah satu desa adat yang berlokasi pada Kecamatan Seram Utara dan dikepalai oleh seorang Raja. Secara administratif Negeri Wahai sama dengan desa pada umumnya, hanya saja berdasarkan atas dasar historis di namakan Negeri Wahai Bukan Desa Wahai, namun pada hakikatnya adalah sama. Hal tersebut didasarkan pada sejarah Maluku sebagai Negeri Raja-Raja, sehingga bentuk pemerintahan yang setara dengan desa disebut dengan Negeri.

Berdasarkan proses observasi awal yang dilakukan oleh peneliti gejala yang nampak oleh penulis adalah proses kinerja oleh Raja (Kepala Desa) di Negeri Wahai kurang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama dan berlaku di Negeri Wahai. Proses kinerja yang dilakukan oleh Raja dan perangkatnya Negeri Wahai kurang memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat, melainkan proses pengambilan cenderung mengandung unsur kepentingan segelintir orang. Hal tersebut tentulah menjadi problema yang sangat krusial terhadap kelangsungan dan perkembangan Negeri Wahai ke depan. Sebagai salah satu Negeri adat yang berada di Kecamatan Seram Utara hal tersebut tentulah

menjadi persoalan yang sangat penting, sebab kinerja yang dilakukan oleh seorang Raja sangat berdampak pada masyarakat luas, khususnya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah negeri dalam pembangunan di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara.

## METHOD

Tipe penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang kebijakan pemerintah negeri terhadap swasta dalam pembangunan infrastruktur di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara. Menurut Moleong (2010 : 11), mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh perangkat pemerintah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara. Data tentang kinerja Pemerintah Negeri Wahai terhadap permasalahan dalam pembangunan diperoleh melalui berbagai sumber yakni:

Tabel 1 Jumlah Informan Wawancara

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | A. S Ohorella. S.IP | Raja Negeri Wahai |
| 2 | Jena Alhamid, S.Pi | Sekretaris Negeri Wahai |
| 3 | Ali Sanaky | Kepala Staf Pemerintah Wahai |
| 4 | Rusaly Rumbati | Tokoh Masyarakat |
| 5 | Sopia Maba | Tokoh Masyarakat |
| 6 | Machmud Makatita | Tokoh Masyarakat |

Data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara secara langsung pada subjek yakni Kepala Desa (Bapak Raja) Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara. Data tersebut seputar kebijakan pemerintahan negeri terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur di Negeri Wahai. Data sekunder adalah data yang berasal dari kajian literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut dapat berupa sejarah Desa (Negeri) Wahai maupun data lainnya yang diperlukan. Data sekunder juga dapat berasal dari hasil wawancara pada masyarakat setempat tentang keadaan desa maupun permasalahan pembangunan infrastruktur di Negeri Wahai. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan wawancara. Analisis data merupakan suatu tahap untuk merangkum dan menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang mudah

dipahami dan diinterpertasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengacu pada teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono yakni reduksi data (*data reduction),* penyajian data *(data display), dan* penarikan kesimpulan *(conclusion drawing).*

## HASIL

### Produktivitas (Kemampuan dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur)

Produktivitas Pemerintah Negeri dalam melaksanakan pembangunan merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja Pemerintah Negeri Wahai yang sangat penting. dalam hal ini Produktivitas adalah hasil *(output)* yang diperoleh dari program pembangunan yang sudah terlaksana di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara yang dapat terwujudkan. Setiap pembangunan yang berlangsung di Negeri Wahai merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan baik dalam penggunaan maupun manfaatnya.

Untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembangunan di Negeri Wahai, Pemerintah Negeri Wahai dan masyarakatnya mengaku bahwa dalam menyelesaikan pembangunan, Pemerintah Negeri Wahai selain berusaha mengoptimalkan waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja, dari pemerintah desa sendiri mengajak masyarakat bekerja sama dalam hal swadaya menyelesaikan suatu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur itu sendiri pemerintah Negeri memiliki kewajiban dalam hal menyelesaikan administrasi kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Negeri.

Pemerintah Negeri sendiri berusaha dapat menyelesaikan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana lebih awal dari waktu yang ditentukan untuk masalah pelaporan, tujuannya agar dalam pelaporan kegiatan lainnya tidak terbengkalai oleh pemerintah negeri. Dari masyarakat sendiri manfaat yang dirasakan dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa yaitu sangat membantu berjalannya aktivitas masyarakat di lingkungan Negeri Wahai.

Dari kegiatan yang sudah terselesaikan ada 15 kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Negeri Wahai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun Program Pembangunan Pemerintah Negeri Wahai diajukan dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), demi kelancaran jalannya pemerintah desa dan pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur

pemasukan dan pengeluaran keuangan desa/negeri. Hal ini menunjukkan produktivitas yang baik dimiliki Pemerintah Negeri Wahai, dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Negeri Wahai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Raja Negeri Wahai bahwa:

> "Pemerintah negeri Wahai dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur selalu berpatokkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah disepakati bersama, sehingga tidak menyimpang dari tujuan pembangunan di Negeri Wahai".

Produktivitas pemerintah Negeri Wahai dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Negeri Wahai menurut staf pemerintah Negeri Wahai dan tokoh masyarakat Negeri Wahai yaitu dalam memulai pembangunan infrastruktur di desa hal yang paling mendukung pembangunan itu yaitu bahan materil, sehingga pemerintah Negeri Wahai berusaha untuk memulai pembangunan hal yang paling utama dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang akan digunakan oleh pekerja lapangan.

Jika bahan bangunan sudah lengkap terkumpul pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan lancar. Langkah yang dipakai pemerintah Negeri Wahai ini agar kegiatan pembangunan tidak meleset dari waktu yang ditentukan, dari pemerintah desa sendiri berusaha mendukung semua kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kegiatan yang sudah terselesaikan ada 5 (lima) kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Negeri Wahai yakni pembangunan rumah adat Negeri Wahai, pembangunan drainase, pembangunan tambatan perahu nelayan, pembangunan balai pertemuan masyarakat, dan pembuatan pagar kantor pemerintahan Negeri Wahai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pembangunan berlangsung di Negeri Wahai. Negeri Wahai merupakan salah satu negeri yang merupakan pusat Kecamatan Seram Utara dan pembangunan-pembangunan fasilitas umum bersumber dari APBD Kabupaten banyak terpusat di daerah ini.

**Responsivitas (kemampuan dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat)**

Pemerintah Negeri sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa/negeri, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. kemudian kewajiban dari pemerintah negeri itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Responsivitas Pemerintah Negeri terkait dengan kemampuan pemerintah negeri untuk menerima aspirasi dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menerima aspirasi dalam program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lalu Pemerintah Negeri berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut ke dalam Program Pembangunan yang tertuang di dalam RPJMDes. Sebelum menerima aspirasi masyarakat tentunya melewati proses menjaring aspirasi masyarakat. Pemerintah Negeri harus sigap setiap waktu, demikian yang dilakukan Pemerintah Negeri Wahai. Selain menerima aspirasi masyarakat, pemerintah Negeri Wahai mengambil kebijakan untuk mengerahkan masing-masing Kepala Dusun untuk menggali aspirasi masyarakat di setiap dusun sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pembangunan, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di wilayah dusun masing-masing.

Pada saat aspirasi sudah terkumpul maka dapat disampaikan kepada Pemerintah Negeri Wahai, untuk ditindak lanjuti dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembang Des). Masyarakat merasa dengan adanya pertemuan di lingkungan setiap dusun semua aspirasi bisa ditampung, baik yang sifatnya kebutuhan atau hanya keinginan saja.

Responsivitas Pemerintah Negeri Wahai dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat. selain menerima dan merealisasikan Pemerintah Negeri Wahai, berinisiatif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di Kantor Negeri Wahai. Pertemuan yang diadakan mengundang para elemen masyarakat yang berperan penting dalam Pembangunan Di Negeri Wahai, untuk membicarakan permasalahan yang di negeri dan menggali aspirasi atau kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat di Negeri Wahai untuk di usulkan ke dalam program pembangunan negeri. Aspirasi yang sudah disampaikan akan ditampung Pemerintah Desa, dan akan disampaikan kembali pada saat musrembang untuk menentukan program-program pembangunan. Untuk rencana pembangunan infrastruktur yang akan berjalan tahun 2013 ini, ada 8 kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Negeri Wahai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa baik di Negeri Wahai memiliki kebijakan-kebijakan sendiri dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, ini artinya pemerintah negeri menyadari bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak bisa terwujud tanpa adanya kerjasama antar pemerintah negeri dengan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Negeri Wahai ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa atau negeri yang belum melibatkan suara masyarakat khususnya dalam membangun desanya. Karena segala kekurangan yang ada di suatu negeri itu masyarakatlah yang paling

tahu dan mengerti, tanpa adanya saran dan kritik dari masyarakat pemerintah desa tidak akan tahu hal apa yang harus dibenahi dan akan menganggap kinerjanya sudah bagus dan memuaskan masyarakat.

**Responsibilitas (Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur)**

Pemerintah Negeri bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintah Negeri yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap Pemerintah Negeri. Melakukan pekerjaan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di negeri baik pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah negeri khususnya dalam pembangunan infrastruktur, responsibilitas pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah negeri untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai keinginan.

Responsiblitas Pemerintah Negeri dalam hal ini adalah dalam menjalankan pemerintahan negeri setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggunngjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur. Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya di bidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negeri sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah negeri maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di negeri sehingga Pemerintah Negeri bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas, fungsinya di dalam Pemerintahan Negeri.

Kinerja perangkat negeri dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seseorang perangkat negeri dalam kerjanya. Dengan kata lain, kinerja individu adalah bagaimana seorang melaksanakan pekerjaannya atau untuk kerjanya. Pembagian sistem kerja tersebut sudah diatur melalui peraturan negeri, sehingga dalam pelaksanaannya sudah memiliki pertanggung jawabannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raja negeri Wahai, dapat diketahui bahwa sistem kerja pemerintahan negeri telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal tersebut terlihat dalam petikan wawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Raja Negeri Wahai bahwa

> "kinerja pemerintahan negeri Wahai bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas dari masing-masing tanggung jawabnya".

Dan menurut Bapak Kepala staf pemerintah negeri bahwa

> "sistem kerja dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu pelaksanaan sesuai dengan tugas yang tertera di peraturan Negeri Wahai.

Menurut Sekretaris Negeri pemerintah Negeri Wahai dari pemerintah negeri sendiri memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan karena dengan cara itu tidak akan terjadi tumpang tindih masalah tanggungjawab yang sudah dibebankan kepada pemerintah negeri. Pada Pemerintah Negeri Wahai di dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan infrastruktur sendiri, setiap unsur pemerintahan negeri berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka sebaik mungkin sehingga pada saat diminta tanggungjawab atas kepercayaan yang diberi khususnya dalam pembangunan infrastruktur maka setiap unsur pemerintahan bisa menunjukkan bagian-bagian yang dikerjakannya ini merupakan wujud tanggungjawab yang telah dibebankan kepada setiap aparat pemerintah negeri.

Strategi perencanaan pembangunan yang sedang dijalankan di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah lebih mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan lainnya. Alasan pembangunan fisik ini dilakukan sebagai sarana yang sangat dibutuhkan untuk jalannya perekonomian yang meningkatkan tingkat kesejahteraan di negeri Wahai. Keadaan jalan dan jembatan di wilayah ini khususnya jalan-jalan yang menjadi akses utama masyarakat mengalami kerusakan da penurunan kualitas akibatnya menghambat perekonomian masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana dan fasilitas lainnya menjadi masalah yang terlihat secara konkret dan jelas yang terjadi di negeri Wahai. Tidak tersedianya balai negeri sebagai tempat pertemuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, serta tidak tersedianya perpustakaan yang lengkap untuk para siswa untuk menambah pengetahuan menjadi masalah yang substansial dari berbagai permasalahan yang terlihat di di negeri Wahai serta jalan yang menjadi akses utama masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pembangunan sarana dan prasarana menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan di Negeri Wahai disesuaikan dengan hasil musyawarah antara badan pemerintahan negeri Wahai dengan masyarakat setempat yang kemudian tuangkan dalam RJPM Negeri Wahai sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang terjadi di Negeri Wahai berdasarkan

prioritas kebutuhan. Melihat wilayah ini merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai seorang petani dan nelayan sehingga untuk menjual hasil pertanian maupun perikanannya menjadi terhambat diakibatkan karena jalan dan jembatan yang hancur. Diharapkan dengan bagusnya infrastruktur akan mendorong jalannya perekonomian masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi. Dengan taraf hidup dan perekonomian yang lebih baik akan mendorong terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri Wahai.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa informan yakni sebagai berikut:

> "Strategi yang sedang katong jalankan di Wahai sini pertama itu katong lihat masyarakat pung prioritas apa? Disini katong lihat rata-rata masyarakat di sini pekerjaannya bertani dan nelayan, namun terkadang mengalami kesusahan mau jual hasil pertanian dimana, kalau deng jalan model bagini. Sementara mau harap apa di sini, kalau ade sandiri lihat katong pung kondisi negeri ini. Jadi berdasarkan katong pung hasil musyawarah bersama kemarin-kemarin itu, yakni antara pemerintahan negeri dengan masyarakat maka katong memperoleh keputusan atas hasil musyawah bersama, yang dituangkan dalam RJPM Negeri Wahai bahwa pembangunan infrastruktur yang paling penting dalam hal ini jembatan, gedung sekolah, selokan, ruang perpustakaan, puskesmas dan yang lebih penting lagi katong pung balai negeri yang lihat akang saja sana banyak yang bocor-bocor dan rusak. Itu samua yang menjadi prioritas katong dan harus dibangun atau diperbaiki. Sehingga diharapkan minimal dengan pembangunan jalan itu ada tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi".

Pernyataan lain yang hampir sama juga dinyatakan oleh sekretaris negeri Wahai yang menyatakan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan di negeri Wahai dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah yakni disesuaikan dengan hasil Keputusan yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah negeri dengan masyarakat negeri Wahai yakni mendahulukan yang dianggap penting atau lebih dibutuhkan oleh butuhkan masyarakat banyak yang kemudian dituangkan dalam RJPM negeri Wahai untuk diajukkan kepada Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan sekretaris negeri Wahai yakni sebagai berikut"

> "Dalam menjalankan pembangunan di sini kami mengacu pada RJPM yang telah dibuat sesuai dan dengan hasil keputusan bersama. Karena bagaimanapun hal tersebut yang menjadi dasarnya. Kita melihat karena di sini rata-rata masyarakat hidup dari bertani dan nelayan, sementara kita semua sama-sama rasakan bagaimana infrastruktur jalan yang ada, setelah itu, puskesmas juga belum ada katong sandiri rasa susah atas hal itu bahkan hampir setiap hari dirasakan. Oleh karena itu, prioritas utama pembangunan yakni bertumpu pada infrastruktur, karena jika infrastruktur bagus, maka perekonomian akan semakin baik. Dengan demikian akan berlahan memperbaiki kualitas SDM yang ada di sini.".

Pernyataan yang samapun dikemukakan oleh kepala staf pemerintahan Wahai yang menyatakan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan negeri Wahai yakni berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Adapun hasil wawancaranya yakni sebagai berikut:

> "Strategi pembangunan yang dijalankan di Wahai sini kita mengacu pada program kerja yang telah kita buat bersama, yakni pembangunan di sini menyangkut permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat banyak seperti dalam bidang pendidikan kita rencanakan pembangunan perpustakaan serta staf pengajar yang berkualitas, dalam bidang kesehatan, kita maksimalkan puskesmas sehingga dapat menumbuhkembangkan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan, dalam bidang pertanian dan perikanan yakni pupuk handal dan pengadaan bagan untuk para nelayan, dalam bidang sarana dan prasarana yakni pembangunan jalan, jembatan serta selokan. Namun, seluruh program tersebut tidak bisa kita jalankan secara serentak keseluruhan semua dilakukan secara bertahap dan juga harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Namun dari segi prioritas utama pembangunan, maka pembangunan jalan yang sangat kami prioritaskan. Sebab sistem ekonomi kita terlihat lumpuh, banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen dan hasil tangkapannya. Oleh sebab itu, hingga saat ini kita sedang berupaya mengajukan proposal untuk perbaikan jalan kepada pemerintah daerah Maluku Tengah untuk sistem perbaikan tersebut"

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh badan pemerintahan Negeri Wahai, pandangan lain dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat Negeri Wahai yakni sebagai berikut:

> "Strategi pembangunan yang kami jalankan dengan kekompakan masyarakat, dan aparatur desa harus bersatu. Apabila tidak seperti ini, maka proses pembangunan di negeri Wahai tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah kita programkan bersama. Lebih-lebih kalau raja tidak disiplin, tidak mengerti hak dan kewajiban tugas dan pokoknya sebagai seorang raja, karena tidak sulit dalam melaksanakan pembangunan. Yang paling mendasar lagi harus ada figur pemimpin di negeri Wahai yang dapat memfasilitasi dan mengakomodir masyarakat dari berbagai pihak. Jika tidak ada yang demikian maka maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di negeri Wahai terbagi dalam program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Yang diprioritaskan dalam proses pembangunan ini yakni pembangunan yang sifatnya berkala atau jangka pendek yaitu sifatnya setahun sekali. Dalam pembangunan berkala ini lebih mengacu pada program pembangunan sarana fisik, yaitu pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan serta gorong-gorong dengan kata lain lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa dasar, proses pembangunan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan sebuah asumsi dasar yaitu jika pembangunan jalan dapat terlaksana dengan baik, maka hal tersebut

dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti menjual hasil panen dan hasil tangkapan dalam bidang perikanan dan sebagainya dengan mudah. Jika kondisi ekonomi dapat berubah menjadi lebih baik, maka hal tersebut dapat membantu serta memperbaiki kondisi kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat di negeri Wahai.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa Pemerintah Negeri Wahai melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung ada di negeri, berdasarkan tugas masing-masing urusan memiliki kewajiban bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di negeri. Dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja akan di beri teguran dan harus memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja, apa bila tidak sesuai maka pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor tidak akan bisa melakukan pencairan dana yang ada dalam kontrak kerja.

**Akuntabilitas (Dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kepada Masyarakat)**

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Negeri adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan negeri yang ada, serta tugas- tugas dan kewenangan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi, pemerintahan Kabupaten/Kota. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di negeri yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan yang dimaksud dengan menginformasikan laporan pembangunan infrastruktur di negeri kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan secara lisan atau tulisan.

Pemerintah Negeri juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pembangunan Infrastruktur di negeri, kepada Bupati melalui camat dan, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah negeri, dan BPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Negeri kepada masyarakat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat negeri menyangkut pembangunan infrastruktur.

Akuntabilitas Pemerintah Negeri dalam hal ini adalah kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penilaian LPJ Pemerintah negeri atas segala kegiatan pembangunan apakah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain BPD wajib meminta Pemerintah Negeri untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah negeri melalui LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dengan asas keterbukaan.

Akuntabilitas Pemerintah Negeri Wahai dalam hal ini adalah, dalam memberikan LPJ Pemerintah Negeri Wahai yang diterima BPD bertandakan akuntabilitas Pemerintah Negeri Wahai selama ini sudah bagus dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD Setelah LPJ Pemerintah Negeri Wahai disetujui, BPD menyampaikan tembusan kepada Bupati melalui Camat. Pada tahun 2010 ada 7 (tujuh) kegiatan pembangunan infrastruktur yang terlaksana di Negeri Wahai dan LPJ kegiatan diterima oleh BPD pada tahun 2010. Dalam hal menginformasikan kegiatan pembangunan infrastruktur di Negeri Wahai, Pemerintah Negeri menempelkan selembaran yang berisi kegiatan yang berlangsung di desa.

## DISKUSI

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Menurut Ginanjar Kartasasmita (2007) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana

Strategi perencanaan pembangunan yang dijalankan di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara berdasarkan hasil penelitian mengacu pada hasil musyawarah bersama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Negeri Wahai. Sekarang ini rancangan pembangunan lebih mengacu pada pada pembangunan fisik atau infrastruktur, dengan alasan jika jalan itu lancar, maka akan membantu kelancaran perekonomian untuk menjual hasil alam atau hasil alam lainnya, dengan tujuan peningkatan taraf hidu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan lebih diutamakan ke pembangunan fisik, itupun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Di samping itu, terdapat pula program non fisik yang dikembangkan atau dijalankan di negeri Wahai, seperti program PNPM Mandiri yang diprogramkan dari pusat. Jika infrastruktur dibangun dengan baik, maka sumber daya alam

dapat dibangun dengan baik pula. Adapun pembangunan yang selama ini dijalankan di negeri Wahai terlihat belum berjalan secara optimal seperti pengelolaan sumber daya alam yang kurang karena masih terhambat oleh sarana dan prasarana yang belum memadai seperti gedung pertemuan yang dapat dijadikan sebagai tempat musyawarah untuk mencapai suatu mufakat oleh masyarakat negeri Wahai.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta informasi yang disampaikan oleh beberapa informan pelaksanaan strategi pembangunan yang dijalankan di negeri Wahai memang belum sepenuhnya menyentuh pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian pembangunan selama ini terus dipacu disesuaikan dengan kebutuhan tapi kendala tetap saja ada salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan di dalam negeri kurang optimal. Di lain sisi pembangunan yang dijalankan selama ini belum menyentuh pada masyarakat hal itu dikarenakan tidak adanya pembinaan kepada raja yang kurang mengerti terhadap tugas pokoknya juga karena kurang koordinasi yang baik. Baik antara pemerintah negeri dengan masyarakat, maupun antara sesama perangkat pemerintahan negeri Wahai.

Pemerintah sebagai motor penggerak dalam pembangunan maju dan tidaknya suatu masyarakat tergantung pada kebijakan pemimpinnya. Suatu wilayah itu terdiri dari manusia dengan segala unsurnya. Oleh karena itu, pembangunan harus seimbang. Artinya pembangunan fisik dibutuhkan, begitu pula pembangunan sumber daya manusianya. Serta sangat diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat serta antara antara pemerintah dengan tokoh-tokoh ulama dan masyarakat.

Di negeri Wahai sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa, namun karena masyarakatnya belum dapat memanfaatkannya dengan maksimal disebabkan keterbatasan berbagai hal seperti kurangnya pembinaan dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggagas pembangunan untuk pengoptimalan desa dan keterbatasan tenaga pelajar yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan sumber daya alam belum dapat diolah dengan baik. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat menyebabkan pembangunan di negeri Wahai menjadi terhambat yakni sarana dan prasarana yang belum memadai terutama jalan, penurunan kualitas jalan menjadi dan jembatan serta hal lainnya. Maka peran pemerintah dalam mengatasi hal ini melaksanakan pembangunan diantaranya yang sedang berjalan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti fisik atau infrastruktur. Sebagai pemecah masalah untuk memperlancar untuk pembangunan lainnya yaitu pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan maupun perkebunan. Karena dengan infrastruktur yang lancar secara langsung akan turut memperlancar potensi sumber daya alam yang ada.

Proses responsivitas yang dimiliki oleh pemerintah Negeri Wahai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya keseimbangan dan pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan di Negeri Wahai. Sebab, tidak semua proses keinginan masyarakat maupun saran yang disampaikan dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pemerintah Negeri Wahai, dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Proses pembangunan yang berlangsung dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah Negeri Wahai dengan masyarakat. Namun pada jajaran pemerintahan negeri disesuaikan dengan tingkat dan kedudukan mereka masing-masing. Setiap perencanaan pembangunan sebelumnya dibahas terlebih dahulu dalam rapat dan ditetapkan di dalam RJPMDes yang kemudian ditetapkan dalam program pembangunan negeri, sehingga nantinya proses pembangunan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat oleh pemerintah negeri serta dapat dilaporkan kepada bupati melalui camat atau Bada Pemerintahan Negeri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan bahwa produktivitas atau kemampuan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Negeri Wahai. Dalam merealisasikan aspirasi masyarakat terlebih dahulu dibahas dalam rapat bersama dan disepakati kemudian dijadikan sebagai tujuan pembangunan melalui penetapan dalam RJPMDes. Responsibilitas atau tanggung jawab pemerintah desa dalam pembangunan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah Negeri juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pembangunan Infrastruktur di negeri, kepada Bupati melalui camat dan, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

## REKOMENDASI

Berdasarkan paparan dan uraian kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan bahwa dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Negeri Wahai sebaiknya memprioritaskan kepentingan masyarakat serta harus tetap mengacu pada RJPMDes yang telah disepakati bersama, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dalam program-program dan dalam merealisasikannya. Melalui keikutsertaannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan maupun keterlibatan dalam menjalankan program-program di Negeri Wahai.

## REFERENCES


Abdullah Rozali. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada)

Agustino Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. (Bandung. AIPI Bandung)

Bappenas. 2003. *Infrastruktur Indonesia Sebelum. Selama. dan Pasca Krisis*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta

Budiman. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. (Jakarta : Pustaka Pelajar)

Budiardjo Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. (*Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama)

Jokrowinoto Moelyarto. 2009. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. (Yogyakarta *:* Kreasi Wacana)

Kartasasmita. Ginanjar. 2007. *Administrasi Pembangunan.* (Jakarta : LP3ES)

Manan Bagir. 1994. *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*. Bandung. makalah dalam lokakarya pancasila

Mashun. Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: BPTE)

Moleong. Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung : Remaja Rosda Karya)

Mubiyarto. 2004. *Pembangunan Pedesaan.* (Yogyakarta *:* P3PK UGM)

Nasucha. Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. (Jakarta: PT. Grasindo)

Pasolong. Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta)

Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Raldi. H. Koestoer. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa Dan Kota*. (Jakarta. UI Press)

Siagian. Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan.* (Jakarta : Gunung Agun)

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung : Alfabeta)

Syafiie Kencana dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta)

Todaro. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga.* (Jakarta : Rineka CIpta)

Tjokroamidjojo. Bintoro. 2005. *manajemen Pembangunan.* (Gunung Agung. Jakarta).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang – undang nomor 32 tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wahab. Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. (Jakarta : Bumi Aksara)

Widjaja. 1988. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia.* (Jakarta. PT Rineka Cipta